

HPN 2022, Mahfud MD: Pers Harus Mampu Ciptakan Ruang Publik Yang Beradab

Nanang Suryana Saputra - JOURNALIST.CO.ID

Feb 9, 2022 - 11:08

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD

JAKARTA – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mewanti-wanti insan pers untuk meningkatkan profesionalisme kerja jurnalistiknya.

Hal itu, sebagai upaya menjaga ruang dan kepercayaan publik terhadap informasi yang mendidik, mencerahkan dan membangun bangsa.

“Bila ingin terus berkelanjutan menjadi pilihan publik yang terpercaya, pers tidak seharusnya menerapkan praktik jurnalisme yang menggampangkan proses dan menurunkan kualitas,” katanya Selasa (8/2/2022) pada Konvensi Media peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022.

Menko Polhukam bahkan merinci upaya-upaya yang harus menjadi perhatian pers sebagai institusi yang turut menjaga demokrasi. Mulai dari menulis tanpa konfirmasi, menulis secara sepihak (tidak cover both sides), memberi pemaknaan keliru pada sebuah peristiwa, memilih nara sumber yang tidak kredibel, hingga praktik clickbait dengan membuat judul-judul berita yang menggoda namun melencengkan maknanya.

“Tindakan seperti itu, adalah praktik yang perlahan tapi pasti menggerus tingkat kepercayaan publik terhadap media, yang sejatinya menjauhkan upaya kita semua untuk membangun model media massa berkelanjutan,” jelasnya.

Media massa, dikatakan Mahfud, harus menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional. Jurnalis harus mampu menciptakan ruang publik yang beradab, karena masyarakat membutuhkan informasi terpercaya.

“Dengan demikian pers tentu akan menjadi mitra pemerintah dalam memberikan masukan dan kritik, yang dalam berbagai kesempatan kerap menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan penting,” ujar Menko Polhukam.

Namun dirinya mengakui, jika saat ini fungsi itu sudah dijalankan sebagian besar media di tanah air. Insan pers menurutnya telah memainkan peranannya sebagai lembaga yang menyajikan informasi, pendidikan, hiburan, dan juga sebagai

kontrol sosial. Di samping itu juga telah menjembatani komunikasi antara publik dan pemerintah.

“Maka itu saya sangat berharap, media massa menghindari sensasi dan mengedepankan kabar bernuansa kondusif. Apalagi di tengah-tengah pandemi yang masih melanda tanah air. Masyarakat kita membutuhkan informasi yang tepat mengenai berbagai upaya pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dalam menangani pandemi ini, termasuk dalam mempercepat pemulihan ekonomi,” tutur Mahfud.

Ia pun mengimbau insan pers untuk terus memperhatikan nilai-nilai kebangsaan, kebersatuan dan keharmonisan bangsa, dan kesadaran akan pentingnya kedaulatan dan keutuhan bangsa dan negara.

Pada kesempatan tersebut, Menko Polhukam kembali mengingatkan jika tidak lama lagi Indonesia akan memasuki tahun politik dengan digelarnya pemilihan Presiden dan anggota legislatif, serta pemilihan kepala daerah secara serentak pada 2024.

Dalam perjalanan menuju itu, peran insan pers akan semakin dibutuhkan dalam mengkomunikasikan kepada publik mengenai berbagai persiapan, dinamika politik, sekaligus sebagai pemersatu anak bangsa.

“Pers menjadi mitra penting pemerintah, dalam menyalurkan informasi mengenai komitmen pemerintah dalam upaya penegakan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, dan penanggulangan radikalisme, serta penguatan nilai-nilai demokrasi,” ujarnya. (***)